



Dr. Sukardi, M.M.
(Dosen Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Ahmad Dahlan)

BULAN November-Desember merupakan bulan banyak curah hujan di pulau Jawa yang posisi daerahnya berada di selatan garis khatulistiwa.

Memang Indonesia merupakan daerah kepulauan yang posisinya terlewati lintasan garis khatulistiwa, posisi yang banyak curah hujan dan banyak sumber air yang dibutuhkan dalam kehidupan.

Islam mengajarkan, Allahlah yang menurunkan hujan dari langit, dari air tumbuh berbagai tanaman dan pepohonan dan dari tumbuhan menghasilkan buah-buahan untuk manusia (Al-Anam 99). Hujan (air) merupakan kebutuhan vital bagi manusia dan seluruh makhluk hidup di dunia. Minum, mandi, mencuci membutuhkan air yang luar biasa

banyaknya, bahkan pemapasan kita setiap saat memerlukan air, udara yang kita hirup bukan sekedar oksigen saja, melainkan terdiri atas H₂O (Hidrogen dan oksigen), pemapasan butuh kelembaban air, setiap saat dalam ruangan dan dalam kendaraan (mobil) orang membutuhkan pelembab penyejuk udara. nikmat apalagi yang kau dustakan?

Tumbuhan bisa berkembang biak dengan baik berada pada daerah yang banyak sumber air dan banyak curah hujannya. Dari air tumbuh berbagai jenis tanaman yang akan meng-

hasilkan buah-buahan untuk manusia. Daerah pertanian menjadi subur karena air, sawah sawah bisa ditanam padi dan panen dua atau tiga kali dalam satu tahun karena daerahnya terdapat sumber air yang cukup, sehingga setiap saat bisa mengaliri lahan persawahannya. Tanaman sayuran di daerah kering bisa menjadi subur di musim penghujan pengairan cukup menunggu hujan turun dari langit, di musim kemarau tanaman sayuran untuk bisa subur harus dialiri air dengan proses rekayasa mengangkat air untuk penyiramannya.

Daerah banyak air banyak tumbuh berbagai jenis tanaman, rerumputan atau pepohonan yang ribuan jenis dan macamnya. Dedaunan tumbuh subur, rerumputan berkembang subur karena air sumber dasarnya. Masyarakat tidak harus memupuk tanaman yang tumbuh secara liar, dedaunan yang kering dan tanaman yang mati membusuk sudah menjadi pupuk otomatis menjadi penyubur tanaman yang tumbuh. Bahkan akar akar tanaman yang dimusim kemarau mati karena kering dan kena panas, di musim hujan mampu menyuburkan tanah menjadi pupuk tanam-

an yang tumbuh. Hewan ternak, unggas berkembang subur di daerah banyak air dan curah hujan. Hewan ternak banyak makan rerumputan dan daun hijau, sumber rerumputan dan daun hijau berada pada daerah banyak air, burung, unggas dan semacamnya bisa hidup subur berada pada daerah yang banyak rerumputan dan tanaman yang biji bijianya disenangi menjadi makanan burung dan unggas. Berbagai rumputan tanaman hijau bisa hidup subur pada daerah yang memiliki sumber air yang cukup, curah hujan cukup.



Daging sapi dari Australia menjadi lebih murah dibanding dari daging sapi Indonesia karena sapi Australia diternak cukup dilepas di padang rumput tanpa harus menyiapkan pakan ternak dari pabrik. Demikian pula di Indonesia daerah dekat hutan, banyak tanah kosong banyak lahan tumbuh rerumputan yang tumbuh liar menjadi sumber makanan ternak. Manakala musim kemarau panjang, rerumputan kering dan tidak tumbuh, hewan ternak mengalami kekurangan makan dan mengalami penurunan produksinya.***

RELAWAN BANTUL BANTU KORBAN GUNUNG SEMERU Bupati: Jangan Repotkan Pemerintah dan Warga



KR-Judiman

Bupati Bantul melepas relawan Bantul bertolak ke Lumajang.

BANTUL (KR) - Relawan Bantul terdiri dari personel Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) dan Palang Merah Indonesia (PMI) serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bantul, Senin (6/12) pagi, bertolak ke Kabupaten Lumajang Jawa Timur wilayah bencana erupsi Gunung Semeru, untuk menyerahkan bantuan tahap pertama berupa bahan makanan, peralatan mandi, peralatan tidur dan obat-obatan. Pemberangkatan rombongan relawan Bantul dilepas oleh Bupati Bantul H Abdul Halim Muslih didampingi Dandim 0729 Bantul Letkol Inf Agus Indra Gunawan dari halaman Kantor BPBD Bantul.

Bupati mengungkapkan, Bantul terkenal dengan relawannya. Dengan adanya bencana erupsi Gunung Semeru ini maka relawan Bantul jiwanya terpenggal untuk membantu masyarakat Lumajang segera menyalurkan bantuan.

Halim berpesan dalam proses pemberian bantuan ke Lumajang, relawan Bantul jangan sampai merepotkan pemerintah maupun masyarakat Lumajang. "Jangan sekali-sekali merepotkan pemerintah dan warga Lumajang," tegasnya.

Selain menyerahkan bantuan, di lokasi bencana juga akan melakukan asesmen untuk pendataan kebutuhan yang diperlukan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru dan dilaporkan ke Pemkab Bantul sebagai pertimbangan untuk pengumpulan bantuan tahap berikutnya. Selain memberangkatkan relawan, Pemkab Bantul sebelumnya juga telah mengirim delegasi ke Lumajang untuk melakukan asesmen.

Sementara Ketua FPRB Bantul, Waljito SH, melaporkan bentuk bantuan dari relawan Bantul yang dikirim ke Lumajang wilayah bencana erupsi Gunung Semeru terdiri bahan makanan dan kebutuhan obat-obatan, peralatan mandi dan peralatan tidur yang dikemas dalam 2 unit truk. Bantuan tersebut merupakan tahap pertama yang berasal dari 25 FPRB Kalurahan di Bantul dan dari PMI Bantul.

Sedangkan personelnya ada 13 relawan yang akan berada di Lumajang 2 atau 3 hari. "Relawan Bantul berharap, bantuan yang disalurkan ke warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini benar-benar bermanfaat untuk mereka," pungkas Waljito. (Jdm)

SOSIALISASI UMK 2022 DI BANTUL Pertemuan Pihak Pengusaha dan Pekerja



KR-Judiman

Sosialisasi tentang UMK di Rumah Kampung.
BANTUL (KR) - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bantul menggelar sosialisasi pemberlakuan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bantul, sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/Kep/2021, tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota Tahun 2022, di Rumah Kampung Jalan Yogya-Bantul, kemarin.

Sosialisasi dibuka PLT Kepala Disnakertrans Bantul, Tirul Widilastuti dan diikuti perwakilan dari pihak pengusaha,

serikat pekerja, pemerintah maupun stakeholder terkait.

Tirul mengemukakan, proses penetapan UMK di Bantul sudah dimulai dengan usulan rekomendasi dari Tim yang meliputi pekerja, pengusaha, pemerintah maupun perguruan tinggi. "Karena penentuan besaran upah minimum di Bantul sudah dimulai dan sekarang sudah menjadi keputusan Gubernur ya mari kita melaksanakannya," ajak Tirul.

Dengan telah dipu-

tuskan SK Gubernur tentang penetapan UMK 2022, pihak pengusaha siap menjalani ketentuan yang diwajibkan sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 373/Kep/2021 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota 2022, yakni akan menyusun dan menerapkan struktur dan skala upah di perusahaan, sehingga upah bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja 1 tahun atau lebih berpedoman pada struktur dan skala upah.

Pihak perusahaan tidak melakukan penangguhan pembayaran UMK 2022. Menjalani larangan membayar upah dibawah UMK 2022. Apabila tidak menjalani ketentuan-ketentuan tersebut maka siap dikenai sanksi administrasi dan atau pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sedangkan pihak Serikat pekerja juga telah sepakat dengan besaran UMK yang sudah diputuskan Gubernur DIY. (Jdm)

FPRB MINTA SATGAS COVID-19 TURUN TANGAN Abaikan Prokes, Pengunjung Pasar Antik Membludak

BANTUL (KR) - Penyelenggaraan pasar antik di Pasar Seni Gabusan (PSG) Sewon Bantul yang sudah berlangsung mendapat catatan dari Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul. Kegiatan tersebut dinilai rawan terjadi penularan Covid-19. Mestinya Pemkab Bantul lebih berhati-hati memberikan rekomendasi yang berpotensi menimbulkan kerumunan.

Ketua Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Bantul, Waljito SH, Senin (6/12), mengatakan pihaknya sangat kecewa kegiatan di PSG tersebut. "Pantia yang menggelar acara tersebut sama sekali mengabaikan protokol kesehatan (Prokes). Pengunjung berdesakan tanpa mempedulikan prokes," tegasnya.

Menurut Waljito tidak memungkiri jika kegiatan tersebut digelar untuk menggerakkan perekono-

mian masyarakat. Namun niat mulia mestinya dibarengi dengan prokes memadai. Jangan sebaliknya, membiarkan warga berjubel tanpa memperhatikan prokes.

Menurutnya, panitia kurang peka dengan kondisi sekarang ini. Karena sarana dan prasarana penunjang protokol kesehatan belum memadai. "Kami sebagai relawan sebagai garda depan dalam penanggulangan Covid-19 kecewa dengan kejadian tersebut. Kerja keras

relawan dan stakeholder lainnya selama ini tidak dianggap," ujarnya.

Waljito justru mempertanyakan mekanisme izin kegiatan tersebut bisa keluar dari Satgas Covid-19 tingkat kapanewon ataupun kabupaten.

"Kami berharap Satgas Covid-19 melakukan evaluasi kegiatan serupa. Mari kita berikhtiar bersama agar Covid ini benar-benar selesai. Saya bukan anti sebuah kegiatan, tapi tolong perhatikan prokes. Kami tidak ingin ada

gelombang ketiga Covid-19 di Bantul," ujarnya.

Sementara Ketua Komisi D DPRD Bantul, Enggar Surya Jatmiko SE MM, kaget dengan pengunjung berjubel tanpa mengindahkan protokol kesehatan dalam acara itu. Politisi Partai Gerindra tersebut berpendapat mestinya ketika Pemda Bantul membuat kegiatan bisa menjadi contoh. Pihaknya minta Satgas Covid-19 mengevaluasi kegiatan di PSG agar semua bisa menjalankan prokes.

Enggar setuju jika perekonomian harus bangkit. Tetapi prokes juga diperhatikan ketika menggelar sebuah event dengan pengunjung banyak. (Roy)



Jl. Jend. Sudirman, Bejen, Bantul, Kecamatan Bantul, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55711

H YASMURI SPd MPdI, WAKIL KETUA KOMISI D

Rehabilitasi Bantul, Pulihkan Kesejahteraan

DALAM setiap penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bantul, pasti dialokasikan bantuan tidak terduga (BTT) setiap tahun. Tahun 2021 besaran BTT di Bantul Rp 31 miliar. Anggaran tersebut digunakan untuk penanganan Covid-19, sisanya untuk penanganan bencana alam di Imogiri, Banguntapan dan Sewon sejak awal musim penghujan.

"Artinya pandemi Covid-19 cukup menguras kemampuan finansial daerah yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Belum lagi banyak APBD Bantul yang terpaksa difocusing untuk penanganan pandemi yang sangat besar," ungkap Wakil Ketua Komisi D DPRD Bantul, H Yasmuri SPd MPdI, Senin (6/12).

Menurutnya, meski alokasi penanganan Covid-19 cukup besar tapi dampak pandemi masih menyisakan 'PR' yang sangat besar pula. Pasalnya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat berubah cukup signifikan. Hal ini tentunya membutuhkan rehabilitasi yang efektif.

Lalu dirimana harus memulai? Merujuk data di Dinsos P3A Bantul, ada sejumlah mekanisme bantuan sosial yang telah disalurkan selama 2021. Di antaranya PKH, BPNT, BSP dan BST yang bersumber dari APBN. Selain itu ada juga Bansos beras yang bersumber dari APBN dan APBD.

PKH sendiri hingga akhir November 2021 sudah disalurkan kepada sedikitnya 58 ribu penerima di Bantul. Sedangkan BNBT dan sembako telah disalurkan kepada hampir 80 ribu penerima pada September 2021. Sedangkan penerima bantuan beras tercatat sekitar 50 ribu penerima.

Semua bantuan itu bisa dikatakan bantuan instan, yang habis setelah digunakan atau dikonsumsi. Sehingga perlu rumusan terkait kebijakan pemerintah yang akan memberi multiplier effect terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Tapi hal ini juga



KR-Istimewa

H Yasmuri SPd MPdI.

harus mempertimbangkan berbagai aspek dan kebutuhan untuk antisipasi potensi melonjaknya kembali kasus Covid-19 di Bantul. "Maka wajar jika masyarakat dan pemerintah masih dihantui serangan Covid gelombang 3," paparnya.

Sementara menurunnya angka positif Covid-19 di Bantul sebenarnya memberi kesempatan luas kepada pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pemulihan. Tetapi memang harus mengutamakan pengendalian penyebaran virus di tengah pulihnya aktivitas masyarakat.

Sebelum berbicara tentang strategi rehabilitasi, ada baiknya untuk memastikan tersedianya sarana protokol kesehatan dan kebijakan ketat terhadap pelanggaran. Sehingga minimal memberikan jaminan keamanan kesehatan kepada masyarakat yang beraktivitas normal, seperti sekolah dan bekerja.

Aspek kesehatan di Bantul sebenarnya sudah cukup mapan, khususnya dalam penanganan Covid-19, dilihat dari tersedianya fasilitas seperti ahelter dan rumah sakit lapangan khusus Covid-19. Serta SDM baik tenaga kesehatan maupun relawan.

Tapi Bantul masih harus berpikir keras pada bidang pendidikan, dimana dalam ujicoba PTM justru diikuti munculnya klaster penyebaran Covid-19 di Sedayu, Kasihan dan Bambanglipuro. Mesti berhasil diatasi tapi kejadian itu membuktikan bahwa langkah yang mungkin diambil bisa membawa resiko tinggi.

Pendidikan di Bantul memang harus mengarah pada PTM. Karena selain pertimbangan kualitas pendidikan, PTM dipercaya akan memiliki multiplier effect pada kondisi sosial dan ekonomi. Sehingga kondisi ujicoba PTM harus menjadi pelajaran dalam penerapan kebijakan pendidikan selanjutnya. Seperti pengetahuan protokol kesehatan dan optimalisasi sarannya.

Sementara rehabilitasi ekonomi bisa dilakukan 'kroyokan' oleh banyak OPD yang ada. Seperti Disnakertrans, DPPKBPM dan Disbud Bantul. Apabila program ketiga OPD tersebut strategis, pasti akan membawa dampak ekonomi yang positif kepada masyarakat. "Belum lagi dengan dipadukan kerja keras dari OPD lainnya," tandas Yasmuri.

Kondisi hilangnya mata pencaharian masyarakat karena PHK harus dipulihkan kembali salah satunya melalui Disnakertrans. Baik melalui sinergitas dengan perusahaan yang ada di Bantul maupun pelatihan ketrampilan kerja. DPPKBPM juga bisa mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat bersama 75 pemerintah kalurahan. Sedangkan Disbud berorientasi pada pemberdayaan pelaku seni yang selama 2 tahun harus 'puasa' karena mininya pentas kesenian.

Langkah-langkah strategis pemerintah itu tentunya tidak serta merta dapat merehabilitasi pasca pandemi tanpa peran dan dukungan masyarakat. Utamanya dengan mematuhi kebijakan penanganan pandemi seperti protokol kesehatan dan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). (Jdm)